

UPAYA PEMERINTAH BRAZIL DALAM MENANGANI PENGUNGSISURIAH

Andi Reskiana Syamsu¹
Nim. 1102045112

Abstract

Syria suffered a humanitarian crisis since 2011 which was the result of the intergovernmental civil war Bashar al Assad with the public. This has caused many people to flee to other countries for help and security. This research were made to find out how the Brazil government's efforts in dealing with Syrian refugees, applying the theory of international cooperation, the concept of humanitarian aid and international refugees. Using descriptive research type. The type of data used is secondary data. The results of this study indicate that the Brazil government's efforts in dealing with Syrian refugees able to overcome the impact of the presence of refugees in Brazil due to open door policy issued by the President Dilma Rouseff to receive Syrian refugees by granting humanitarian visas. The efforts of the Brazilian government to handle refugees comprised of domestic efforts to include refugees in the Bolsa familia program, implementing local integration programs and overseas efforts in collaboration with UNHCR including the cooperatioan of humanitarian visa and resettlement programs.

Keywords: *Brazil Efforts, Syrian Refugees*

Pendahuluan

Pengungsi menjadi salah satu masalah global dan multidimensional yang merupakan persoalan rumit bagi masyarakat internasional. Jumlah pengungsi semakin meningkat seiring dengan banyaknya konflik internal dan internasional serta bencana yang terjadi. Kehidupan di penampungan yang terbatas dengan sumber daya membuat pengungsi berada dalam ketidakpastian perlindungan dan pemenuhan HAM. Selain itu, berbagai perlakuan diskriminatif dan kesulitan dalam memperoleh akses pelayanan yang baik, sering pula dirasakan pengungsi. Hal tersebut kemudian membuat masyarakat internasional terus berupaya memberikan perhatian serius dalam penanganan pengungsi, salah satunya yaitu dalam penanganan pengungsi Suriah.

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: annareskiana@gmail.com

Pengungsian penduduk sipil Suriah dimulai sejak 2011 yang disebabkan oleh terjadinya konflik di dalam Suriah. Konflik tersebut berawal ketika adanya penangkapan sejumlah anak-anak di Kota Daraa pada Maret 2011 karena menuliskan slogan revolusi anti pemerintah, yaitu dengan slogan tentang penolakan dan anti Presiden Suriah di dinding sekolah. Anak-anak ini kemudian diinterogasi dan mengalami siksaan oleh tentara Suriah. Hal tersebut membuat rakyat Suriah bergejolak menentang pemerintahan yang kemudian menjadi dasar munculnya aksi protes rakyat Suriah di jalan-jalan kota. Pada dasarnya demonstrasi di Suriah ini terjadi sebagai bentuk kekecewaan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad.

International Commite of Red Cross (ICRC) menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan perang saudara antara pemerintah dan rakyat Suriah yang menghendaki adanya revolusi. Konflik tersebut semakin parah sejak munculnya Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) yang terbentuk pada April 2013. ISIS merupakan kelompok Islam radikal yang berusaha mendirikan negara Islam di wilayah Iraq dan Suriah. Tidak hanya berselisih dengan pemerintah, kelompok ISIS juga berselisih dengan kelompok oposisi di Suriah. Selain ISIS, beberapa negara juga terlibat dalam konflik tersebut yakni Rusia dan Iran yang berafiliasi kepada pihak pemerintah serta Turki yang berafiliasi kepada pihak oposisi. Konflik di Suriah pun menjadi konflik yang berkepanjangan yang melibatkan berbagai aktor.

Berdasarkan data *Syrian Center for Policy Reseaerch (RCPR)*, jumlah korban tewas akibat konflik dari tahun 2011 hingga Februari 2016 adalah sebanyak 470.000 jiwa. Situasi tersebut menyebabkan banyaknya penduduk sipil yang harus mengungsi untuk mendapatkan perlindungan dan tempat aman dari konflik. Penduduk sipil Suriah mencari perlindungan dengan mengungsi ke beberapa negara tetangga seperti Turki, Lebanon, Irak, Yordania maupun Mesir. Jumlah pengungsi terbesar berada di Turki. Hingga Juli 2015 tercatat pengungsi Suriah di Turki mencapai 1.805.255 jiwa. Pengungsi Suriah juga mencari perlindungan ke wilayah yang lebih jauh yaitu di wilayah Amerika Latin. Di wilayah ini, Brazil merupakan negara terbesar yang menerima pengungsi Suriah yaitu sebanyak 8.474 jiwa.

Faktor utama yang menyebabkan pengungsi Suriah datang ke Brazil adalah karena adanya kebijakan pintu terbuka dari pemerintah Brazil untuk menerima pengungsi Suriah dengan memberikan visa kemanusiaan (*Humanitarian Visa*). Kebijakan visa kemanusiaan ini diberikan atas dasar bantuan kemanusiaan yaitu untuk menunjukkan kepedulian terhadap pengungsi Suriah yang terus bertambah akibat konflik. Selain itu karena komitmen Brazil terhadap Konvensi UNHCR 1951 dan Protokol 1967 dan adanya peran penduduk keturunan Suriah terhadap perekonomian Brazil dengan membentuk kamar dagang yaitu *Club Homs* yang membantu pemerintah menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, pengungsi Suriah semakin banyak datang ke Brazil. Kedatangan pengungsi tersebut kemudian berdampak pada keamanan sosial, politik dan ekonomi di Brazil. Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kedatangan pengungsi, Brazil melakukan berbagai upaya baik internal maupun eksternal. Tulisan ini akan

menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Brazil dalam menangani pengungsi Suriah 2011 hingga 2016.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

Menurut Teuku May Rudy, kerjasama internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Sementara menurut KJ. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kebutuhan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama dengan negara lain ataupun organisasi internasional merupakan upaya dari Brazil untuk membantu dalam penanganan pengungsi Suriah. Karena gelombang pengungsi Suriah adalah permasalahan global dan menyangkut kehidupan dari masyarakat internasional. Brazil sebagai negara di wilayah Amerika Latin yang memiliki jumlah pengungsi terbesar, sangat memerlukan upaya-upaya strategis dan konkrit untuk membantu pengungsi dalam segala kelangsungan hidupnya.

Konsep Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian Assistance)

Humanitarian assistance merupakan suatu aksi bantuan (humanitarian aid) maupun tindakan kemanusiaan (humanitarian action) yang dibuat untuk menyelamatkan hidup orang banyak, meringankan penderitaan serta memelihara dan melindungi martabat manusia selama maupun setelah terjadinya suatu permasalahan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri atau bencana alam. Bantuan dapat diberikan dari semua pihak seperti pemerintah, organisasi internasional, NGO, para sukarelawan, pendonor dan penduduk lokal.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga prinsip utama dalam melakukan bantuan kemanusiaan, antara lain :

a. *Humanitarian*

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap manusia yang mengalami penderitaan harus diberikan bantuan dimanapun mereka berada sebagai tujuan dari aksi kemanusiaan yang memiliki landasan untuk melindungi kehidupan dan menjamin rasa saling menghargai antar manusia. Prinsip ini berangkat dari situasi dimana orang-orang terasing dari esensi mereka dari manusia, untuk menjamin akses dari kebutuhannya perlu bantuan dari masyarakat internasional.

b. *Impartial*

Prinsip ini mengacu pada pola kerja kemanusiaan yang dilakukan tanpa diskriminasi dengan tidak mempertimbangkan kewarganegaraan, suku, agama atau ras pada saat menolong mereka.

c. *Neutrality*

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang memberikan bantuan harus bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak yang bertikai dalam konflik. Bantuan yang diberikan harus ditujukan kepada warga sipil yang merupakan korban konflik.

Konsep Pengungsi Internasional

pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. Dapat pula dalam bentuk pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian atau penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi. Perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya tekanan atau ancaman. Perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang.

Dilihat dari faktor penyebabnya pengungsi dibagi dua yaitu, pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa alam (*natural disaster*) dan pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (*human made disaster*):

- a. Pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa alam (*natural disaster*) yaitu orang-orang yang terpaksa meninggalkan wilayahnya disebabkan terjadinya bencana alam seperti gempa, tsunami, topan, longsor, banjir dan lain-lain.
- b. Pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (*human made disaster*) adalah orang-orang yang mengungsi dikarenakan adanya peristiwa mengancam yang menyebabkan mereka merasa tidak aman untuk tetap tinggal di wilayah asalnya. Peristiwa tersebut diakibatkan karena perbuatan manusia seperti kerusuhan, perang, pelanggaran HAM, konflik etnis dan lain-lain.

Dari segi wilayah, pengungsi dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Pengungsi internal (*internal displaced person/IDP*)

Adalah setiap individu atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka untuk menghindari konflik bersenjata,

kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana alam tetapi masih berada di dalam wilayah negara mereka sendiri.

- b. Pengungsi lintas batas (*refugee*)
Adalah masyarakat yang menyeberangi garis batas internasional ke negara lain dalam suatu usaha untuk keluar dari pertempuran atau pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Brazil mengatur mengenai pengungsi pada Undang-Undang Pengungsi Tahun 1997. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, berisi mengenai pengertian pengungsi dan seseorang dapat dikategorikan sebagai pengungsi apabila :

- a. Karena kekhawatiran atas penganiayaan dengan sebab ras, agama, nasionalitas, kelompok sosial, atau opini politik seseorang pergi meninggalkan negara nasionalitasnya yang tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk mengandalkan perlindungan pada negara tersebut.
- b. Tidak mempunyai nasionalitas dan keluar dari negara dimana dia sebelumnya tinggal secara permanen, tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk kembali ke negara tersebut berdasarkan kondisi yang disebutkan diatas.
- c. Karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum dan keras, orang tersebut dipaksa untuk meninggalkan negara asal mereka untuk pindah ke negara lain.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana upaya pemerintah Brazil dalam menangani pengungsi Suriah tahun 2011-2016. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, koran, bahan-bahan internet dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik telaah pustaka (*library research*) dan teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil Penelitian

Dampak Kedatangan Pengungsi Suriah Terhadap Brazil

1. Dampak Bidang Ekonomi

Pada awalnya kedatangan pengungsi di Brazil tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Brazil. Karena Brazil dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di kawasannya. Namun pada tahun 2014, Brazil mulai mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan terjadinya korupsi besar-besaran di perusahaan minyak milik negara, Petrobras. Petrobras merupakan perusahaan minyak terbesar di kawasan Amerika Latin. Skandal Petrobras melibatkan banyak perusahaan lain. Terhitung sembilan perusahaan konstruksi terbesar di Brazil ikut terlibat, antara lain Camargo Correa, OAS, UTC, Odebrecht, Mendes Junior, Engevix, Queiroz Galvao, Lesa dan Galvao Engenharia. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan penyumbang dana terbesar partai politik. Hal ini mengakibatkan ekonomi Brazil minus 3,8% pada tahun 2015 dan perusahaan-perusahaan besar pun melakukan PHK sehingga meningkatkan pengangguran di Brazil. Jumlah pengangguran pada tahun 2014 sebanyak 10.000.000 dan mencapai 12.000.000 pada tahun 2015.

Krisis ekonomi Brazil menjadi semakin sulit karena keberadaan pengungsi yang menuntut Brazil harus mengeluarkan dana bantuan untuk pengungsi. Sementara Brazil juga mulai kesulitan dalam menangani krisis ekonomi dalam negeri. Sejak kedatangan pengungsi Suriah di Brazil tahun 2013, negara bagianlah yang bertanggung jawab menampung para pengungsi selama permohonan suaka diproses. Seperti Sao Paulo dan Rio de Janeiro yang merupakan negara bagian yang menerima pengungsi. Akibat dari kedatangan pengungsi tersebut, negara bagian mengalami kesulitan dalam memberikan anggaran untuk pengungsi. Hal tersebut karena negara bagian tidak memiliki kebijakan untuk pendanaan pengungsi. Pendanaan pengungsi berasal dari pemerintah federal. Untuk membantu negara bagian pemerintah federal memberikan kontribusi sebesar R\$ 15 juta atau sekitar US\$ 4 juta untuk keseluruhan pengungsi.

2. Dampak Bidang Sosial

Kedatangan pengungsi Suriah di Brazil tidak hanya memberikan dampak yang terhadap bidang ekonomi namun juga dalam bidang sosial. Dengan kehadiran pengungsi Suriah membuat Brazil mengalami kepadatan penduduk. Brazil telah dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Ditambah dengan masuknya pengungsi membuat kepadatan penduduk Brazil meningkat. Berdasarkan data dari World Bank jumlah hingga tahun 2015 jumlah penduduk Brazil mencapai 206.000.000. Hal ini menempatkan Brazil sebagai negara dengan jumlah penduduk kelima terpadat di dunia.

Akibat dari hal tersebut, membuat timbulnya beberapa penolakan terhadap kehadiran pengungsi. Tercatat pada tahun 2015, terjadi penyerangan terhadap pengungsi di lingkungan Copacabana, Rio de Janeiro. Pengungsi tersebut diserang saat sedang bekerja dengan membuka kios makanan ringan Arab di trotoar jalan tersebut. Para penyerang mengatakan untuk “keluar dari negara mereka” karena mereka menuntut pengungsi untuk membayar sekitar \$ 3.000 jika ingin membuka kios di daerah tersebut. Media setempat menyiarkan video mengenai insiden tersebut, dimana salah satu penyerang bersenjatakan sepotong kayu berteriak, “Keluarlah dari negara saya! Saya orang Brazil dan saya menyaksikan negara saya diserang oleh para pelaku bom bunuh diri yang membunuh anak-anak dan remaja.” Sementara yang lain melemparkan dagangan pengungsi tersebut ke tanah dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik mereka, pengungsi tidak akan mengambil tempat mereka. Penyerangan terhadap pengungsi di Brazil merupakan indikasi penolakan terhadap kehadiran pengungsi. Aksi penyerangan ini terjadi di wilayah yang biasanya ramah terhadap kedatangan pengungsi namun sikap masyarakat telah berubah.

Dampak sosial lainnya yaitu adanya pengungsi yang harus tinggal di pinggir jalan kota Brazil karena tingginya biaya perumahan di Brazil sementara tidak semua pengungsi mendapat fasilitas perumahan dari pemerintah. Keberadaan pengungsi di pinggir jalan membuat bertambahnya pemukiman kumuh di Brazil karena digunakan oleh pengungsi untuk bermukim.

3. Dampak Bidang Politik

Kehadiran pengungsi Suriah di Brazil juga memberi dampak pada bidang politik. Kehadiran pengungsi Suriah telah memicu pro dan kontra baik di pemerintahan maupun di kalangan masyarakat Brazil. Kedatangan pengungsi yang awalnya diterima dengan baik kini berubah. Rangkaian demonstrasi mulai terjadi untuk menolak pengungsi oleh Kelompok anti Islam Brazil, Geracao Jesus Cristo. Kelompok ini mengorganisir demonstrasi menentang Islam di Rio de Janeiro. Beberapa demonstran membawa spanduk dengan pesan Islamophobia, yakni "Islam: Pembunuhan Hukum di Brazil." Kedatangan pengungsi membuat demonstrasi anti Islam dan anti imigran oleh Geracao Jesus Cristo dan kelompok-kelompok fundamentalis kanan lainnya telah menjadi umum di Brazil. Pada tahun 2015, kelompok fasis bernama Direita Sao Paulo juga mengadakan demonstrasi di Sao Paulo melawan undang-undang migrasi Brazil dan kebijakan visa kemanusiaan Presiden Dilma Rouseff.

Sementara aktivis sayap kiri dan aktivis hak asasi manusia juga melakukan demontasi balik untuk membela keberadaan pengungsi. Presiden Dilma Rouseff pun menghimbau warga Brazil agar tetap bersikap baik dan membantu para pengungsi serta agar tidak terpengaruh oleh slogan-slogan Islamophobia. Pemerintah Brazil dan golongan kiri yaitu aktivis hak asasi manusia bekerjasama dalam membantu pengungsi. Hal tersebut dilakukan karena mereka beranggapan bahwa kehadiran pengungsi juga memberikan manfaat untuk Brazil. Brazil selama ini kekurangan tenaga kerja terampil sehingga Brazil dapat mengambil manfaat dari mengalirnya tenaga kerja yang berbakat. Selain itu memberikan kontribusi yang signifikan pada pengungsi dapat meningkatkan reputasi Brazil di luar negeri khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia dan membantu mengimbangi citra negatif yang dihasilkan oleh krisis ekonomi dan politik di Brazil.

Aksi demonstrasi dilakukan sepanjang tahun 2015 dan merupakan puncaknya pada bulan Agustus 2015. Warga Brazil turun ke jalan-jalan kota melakukan demonstrasi anti pemerintah dengan mengenakan pakaian kuning dan hijau yang merupakan warna bendera dari Brazil dan meneriakkan slogan Fora Dilma yang berarti Dilma turun. Sementara itu, akibat dari kebijakan visa kemanusiaan juga berimbas dengan terjadinya perpecahan di kubu pemerintah. Wakil Presiden Michel Temer tidak menyetujui kebijakan Brazil untuk terus menerima pengungsi.

Seperti yang diketahui dengan timbulnya berbagai dampak akibat dari kedatangan pengungsi, pemerintah Brazil pun melakukan berbagai upaya untuk menangani pengungsi Suriah.

Upaya Internal Brazil

1. Penerapan Program Bolsa Familia

Salah satu upaya yang dilakukan Brazil dalam menangani pengungsi yakni dengan menyertakan pengungsi pada program Bolsa Familia. Bolsa Familia merupakan program dari pemerintah Brazil untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Program ini dimulai pada tahun 2003 pada masa pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Tingkat kemiskinan Brazil mengalami penurunan

sebesar 27,7% pada masa jabatan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva tersebut. Melihat keberhasilan dari program tersebut sehingga Presiden Dilma Rouseff melanjutkan penerapan kebijakan Bolsa Familia pada masa pemerintahannya.

Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah berupa tunjangan tunai dan bantuan pendidikan gratis untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tersebut.

Program ini pada awalnya hanya ditujukan untuk penduduk Brazil namun melihat perkembangan dari program Bolsa Familia tersebut, sehingga Presiden Dilma Rouseff juga mengikut sertakan pengungsi pada program ini sebagai upaya dalam menangani dampak ekonomi maupun sosial yang ditimbulkan dari kehadiran pengungsi. Melalui Bolsa Familia, Rouseff berkeinginan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pengungsi karena Brazil tidak memiliki kebijakan bantuan keuangan khusus untuk pengungsi. Untuk mendapatkan bantuan ini, pengungsi harus terdaftar dalam Daftar Rumah Tangga Terpadu (Cadastro Unico para Programas Sociais), harus memenuhi kriteria kelayakan pendapatan yaitu sebesar R\$ 77 per orang atau sebesar R\$ 154 per keluarga, dan harus mematuhi kriteria penerimaan yaitu kehadiran sekolah bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

Setelah terdaftar dalam program Bolsa Familia, pengungsi akan mendapat kartu Bolsa Familia yang digunakan untuk mengambil dana bantuan setiap bulannya. Dana tunai diserahkan melalui sistem kartu yakni Citizens Card yang dikirimkan via pos. Kartu tersebut berfungsi seperti kartu debit yang diterbitkan oleh bank pemerintah Brazil yakni Caixa Economica Federal secara nasional. Dana tunai tersebut dapat diambil melalui ATM di 14.000 lokasi di Brazil.

Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan dana sebesar US \$ 41 setiap bulannya kepada pengungsi. Angka tersebut berbeda dengan yang diberikan untuk warga negara Brazil untuk mencegah terjadinya konflik antara pengungsi dan warga Brazil. Jumlah yang diberikan untuk warga Brazil yakni sebesar US \$ 55 setiap bulannya. Namun program ini belum berjalan maksimal untuk pengungsi, karena hingga tahun 2015 hanya sekitar 400 keluarga pengungsi yang mendapat bantuan dari program ini.

2. *Penerapan Progam Local Integration*

Local Integration merupakan program kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi pengungsi dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, perumahan dan lowongan kerja. Program ini diumumkan oleh Brazil dalam rangka memperingati 30 tahun *Cartagena Declaration of Refugees* (perjanjian Amerika Latin, Meksiko dan Panama untuk menunjukkan komitmen terhadap perlindungan pengungsi sesuai dengan Konvensi UNHCR 1951) pada tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Brazil bekerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat, yaitu *Antonio Vieira Association (ASAV)*, *Caritas Arquidiocesana of Manaus (CAM)*, *Caritas Arquidiocesana of Rio de Janeiro*

(CARJ) dan *Caritas Arquidiocesana of Sao Paulo* (CASP). Organisasi-organisasi ini merupakan organisasi amal yang bergerak dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada pengungsi, imigran, dan pencari suaka.

Pemerintah menerapkan program Local Integration dengan tujuan agar tercipta kemandirian pada pengungsi karena pemerintah Brazil tidak selamanya akan memberikan bantuan keuangan. Agar berhasil diintegrasikan, pengungsi membutuhkan pekerjaan, keterampilan bahasa, dan akses ke layanan publik. Kegiatan untuk integrasi lokal terutama dilakukan oleh organisasi Caritas Arquidiocesana di Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Organisasi ini dengan dukungan pemerintah membantu pengungsi dalam hal memberikan pelatihan bahasa Portugis, pelatihan kerja, bantuan hukum serta memberikan informasi mengenai pekerjaan dan perumahan di Brazil.

Upaya pemerintah melalui program ini merupakan langkah yang tepat karena terjalannya kerjasama dengan masyarakat sipil untuk membantu pengungsi. Kerjasama tersebut akan meringankan pekerjaan pemerintah dalam menangani pengungsi.

Upaya Eksternal Brazil Bekerjasama dengan UNHCR

Upaya eksternal yang dilakukan Brazil dalam menangani pengungsi yaitu bekerjasama dengan UNHCR sebagai lembaga khusus yang menangani masalah pengungsi. Kerjasama Brazil dengan UNHCR dalam program Visa Kemanusiaan (Humanitarian Visa) program Pemukiman Kembali (Resettlement).

UNHCR didirikan pada tahun 1950 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan tindakan internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pengungsi. UNHCR berusaha memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak untuk mencari suaka dan mencari tempat berlindung yang aman di negara lain, dengan pilihan untuk segera kembali ke rumah secara sukarela, berintegrasi secara lokal atau bermukim di negara ketiga. UNHCR juga memiliki mandat untuk membantu orang-orang tanpa kewarganegaraan.

UNHCR diberi mandat oleh PBB untuk mengkoordinasikan aksi internasional untuk perlindungan pengungsi di seluruh dunia serta penyelesaian masalah pengungsi. Oleh karena itu, Brazil bekerjasama dengan UNHCR dalam upaya penanganan pengungsi. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama program visa kemanusiaan dan kerjasama program *resettlement*.

a. Kerjasama Program Visa Kemanusiaan

Visa kemanusiaan (*Humanitarian Visa*) merupakan kebijakan dari pemerintah Brazil yang dikeluarkan khusus kepada pengungsi Suriah yang ingin mencari perlindungan ke Brazil. Kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2013 melalui Komite Nasional untuk Pengungsi (CONARE).

Menurut pengumuman yang dibuat oleh CONARE, kedutaan Brazil di negara-negara tetangga Suriah akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan visa kemanusiaan bagi pengungsi yang ingin datang ke Brazil. Melalui visa kemanusiaan tersebut, pengungsi mendapat izin tinggal selama dua tahun. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah Brazil hingga tahun 2015.

UNHCR menyambut baik kebijakan visa kemanusiaan dari pemerintah Brazil tersebut. UNHCR mengatakan bahwa Brazil merupakan negara pertama di kawasan Amerika yang memberikan visa kemanusiaan terhadap pengungsi Suriah. UNHCR dan Brazil kemudian bekerjasama dalam program ini. Pada tahun 2015, UNHCR bersama Brazil meresmikan dan menandatangani kerjasama program visa kemanusiaan ini.

Berdasarkan perjanjian tersebut, UNHCR dan Brazil menyetujui serangkaian kegiatan untuk membuat proses pemberian visa kemanusiaan lebih efektif dan aman. Prosedur yang lebih baik diterapkan untuk mengidentifikasi keluarga dan orang-orang dengan kebutuhan khusus yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan visa kemanusiaan Brazil. Bukan hanya warga negara Suriah, tetapi juga orang lain yang terkena dampak dari konflik Suriah dapat mengambil manfaat dari program ini.

Berdasarkan perjanjian tersebut, UNHCR dan Brazil menyetujui serangkaian kegiatan untuk membuat proses pemberian visa kemanusiaan lebih efektif dan aman. Prosedur yang lebih baik diterapkan untuk mengidentifikasi keluarga dan orang-orang dengan kebutuhan khusus yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan visa kemanusiaan Brazil. Bukan hanya warga negara Suriah, tetapi juga orang lain yang terkena dampak dari konflik Suriah dapat mengambil manfaat dari program ini.

Kerjasama antara UNHCR dan Brazil mencakup pertukaran informasi dan keahlian di Yordania, Lebanon dan Turki, pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk penerimaan pengungsi, teknik wawancara dan identifikasi calon potensial untuk visa kemanusiaan serta perpanjangan kebijakan visa kemanusiaan untuk dua tahun berikutnya yaitu hingga tahun 2017.

b. Kerjasama Program *Resettlement*

Brazil dan UNHCR menandatangani *Macro Agreement for The Resettlement of Refugees in Brazil* pada tahun 1999. Perjanjian ini menyebutkan bahwa proses *resettlement* di Brazil dilakukan antara pemerintah dan UNHCR. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membuat persyaratan dokumen dan layanan publik pengungsi, baik level nasional maupun level federal. Sedangkan UNHCR bertanggung jawab untuk melakukan transfer pengungsi dari negara asal pengungsi menuju Brazil. Melalui kerangka perjanjian tersebut, Brazil bersama UNHCR bekerjasama dalam program pemukiman kembali pengungsi Suriah di Brazil.

UNHCR mencatat terdapat lebih dari tiga juta warga Suriah yang berstatus sebagai pengungsi sampai akhir tahun 2014. Mereka tersebar di berbagai negara yang salah satunya adalah Brazil yang telah menerima pengungsi Suriah sejak tahun 2011 dari awal terjadinya konflik Suriah.

Brazil tidak menetapkan kuota tahunan untuk pengungsi yang dimukimkan kembali. Namun CONARE memprioritaskan dua kelompok rentan yaitu pengungsi tanpa perlindungan hukum atau fisik dan pengungsi wanita. Strategi resettlement di Brazil bersifat terdesentralisasi berdasarkan kotamadya masing-masing yang bekerjasama dengan UNHCR.

Untuk mendapatkan aplikasi program ini, pengungsi yang telah datang ke Brazil mendaftarkan diri pada CONARE dalam waktu 72 jam sejak kedatangan. Pihak CONARE yang bertanggung jawab untuk menganalisis aplikasi suaka dan merumuskan kebijakan publik. Program ini didanai oleh UNHCR dan berlaku untuk 12 bulan.

Brazil merupakan negara terbanyak kelima setelah Jerman, Amerika Serikat, Kanada dan Swedia yang memberikan pemukiman kembali kepada pengungsi Suriah, yaitu sebanyak 7.000 pengungsi Suriah telah dimukimkan kembali di Brazil.

Kesimpulan

Upaya pemerintah Brazil dalam menangani pengungsi Suriah merupakan usaha yang dilakukan pemerintah Brazil dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dan menangani permasalahan yang diakibatkan oleh kedatangan pengungsi guna untuk menjaga keamanan sosial, politik dan ekonomi Brazil.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Brazil mulai dari upaya dalam negeri yang meliputi mengikut sertakan pengungsi dalam program *Bolsa Familia* dan menerapkan program *Local Integration*. Sementara upaya luar negeri yang dilakukan Brazil yaitu melakukan kerjasama dengan UNHCR dalam penerapan kebijakan visa kemanusiaan (*humanitarian visa*) dan program *resettlement* pengungsi.

Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Brazil belum mampu mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kedatangan pengungsi sehingga tetap dibutuhkan upaya-upaya dan kerjasama dengan berbagai pihak agar penanganan terhadap pengungsi dapat dilakukan secara maksimal dan pengungsi mendapatkan haknya secara penuh.

Daftar Pustaka

Buku

Agastya ABM.2013. *Arab Spring*, Jogjakarta: IRCiSoD.

El Muhtaj, Majda. *Dimensi – Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: PT. Rajakfarindo Utama.

Holsti, KJ. 1998. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis Jilid II*, Jakarta: Erlangga.

Leader, Nicholas. 2000. *The Politics of Principle: The Principles of Humanitarian Action in Practice*, London: Overseas Development Intitute.

Mackintosh, Kate. 2000. *The Principles of Humanitarian Action in International Law*, London: Overseas Development Institute.

Perwita, Anak Agung Banyu, dan Yanyan Mochamad Yani. 2011. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya.

Rudy, Teuku May. 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Eresco.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Jubilut, Liliana Lyra. 2005. *Refugee Status Determination in Brazil: A Tripartite Enterprise. Refuge*. Vol. 25 No. 2, 2015. Diunduh dari <http://refuge.journals.yorku.ca>.

Yuliantiningsih, Aryuni. 2013. *Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 1 Januari 2013. Diunduh dari <http://www.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/164/112>.

Website

Alternatives to Europe: Syrian Refugees in Brazil, terdapat di [http:// regionalmms.org](http://regionalmms.org), diakses 20 Desember 2017.

A Framework for Cooperation and Regional Solidarity to Strengthen the International Protection of Refugees, Displaced and Stateless Person in Latin America and The Caribbean, terdapat di <http://www.acnur.org>, diakses pada 30 April 2018.

A Syrian in Brazil: An Interview With Global Voices Contributor Rami Alhames, terdapat di <http://www.globalvoiceonline.org>, diakses 1 April 2018.

Brazil's Conditional Cash Transfer Programme Bolsa Familia, terdapat di <http://www.ilo.org>, diakses pada 15 Mei 2018.

Brazil welcomes syrian refugees with 'open arms,' president says, terdapat di <http://newsinfo.inquirer.net>, diakses 13 November 2017.

Brazil evolving relationship with refugees, terdapat di <http://www.orientalia.hypothesis.org>, diakses 11 Desember 2017.

Brazil longer safe refugees and immigrants, terdapat di <http://aljazeera.com>, diakses 10 Desember 2017.

Brazil's Syrians Divided on Bashar Al Assad, terdapat di <http://www.aljazeera.com>, diakses 22 November 2017.

Brazil : Ten Years of Refugees Protection, terdapat di <http://www.fmreview.org>, diakses 15 November 2017.

Brazil and UNHCR Strengthen Partnership to Help Refugees Fleeing The Syria Conflict, terdapat di <http://www.unhcr.org>, diakses pada 20 Desember 2018.

Defining Humanitarian Assistance, terdapat di <http://www.globalhumanitarianassistance.org>, diakses pada 12 Desember 2017.

Disability and Displacement, terdapat di <http://www.fmreview.org>, diakses pada 16 Mei 2018.

Family Allowance Extended to Refugees in Brazil, terdapat di <http://www.fmreview.org>, diakses pada 5 Mei 2018.

Issues for Refugees and Asylum Seeker, terdapat di <http://careresearch.com.au>, diakses 4 April 2017.

Krisis Ekonomi Brazil Menuju Rekor Terburuk, terdapat di <http://www.sindonews.com>, diakses 29 Mei 2018.

Latin American Countries Response to The Syrian Refugees, terdapat di <http://www.coha.org>, diakses 21 November 2017.

Rule of Terror: Living Under ISIS in Syria, terdapat di <http://www.ohchr.org>, diakses 4 April 2016.

Resettlement to Brazil, terdapat di <http://refugeelegalaidinformation.org>, diakses pada 15 Mei 2018.

Road to Rio: Brazil Offers Syrian Refugees a New Home but The Economy Puts Their Latin American Future in Question, terdapat di <http://www.ibtimes.com>, diakses 4 Januari 2018.

Syrian Refugees in Brazil, terdapat di <http://www.regionalmms.org>, diakses pada 20 Desember 2018.

Temer and Refugees Brazil, terdapat di <http://www.americasquarterly.org>, diakses pada 12 Mei 2018.

The Legal Framework and Institutional Assistance for Refugees in Brazil Since the Mid-Twentieth Century, terdapat di www.peacepalace.library.nl, diakses 21 November 2017.

UNHCR Pengungsi, terdapat di <http://unhcr.or.id>, diakses 21 Oktober 2016 pukul.

Why is EU Struggling With Migrants and Asylum, terdapat di <http://www.bbc.com>, diakses 9 Desember 2017.

470 Ribu Penduduk Tewas Akibat Perang 5 Tahun di Suriah, terdapat di <http://m.tempo.co>, diakses 21 Oktober 2016.